

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Menurut penjelasan dari beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan Laut China Selatan adalah kawasan yang sangat strategis. Dengan potensi alam yang sangat besar dan sebagai jalur pelayaran paling sibuk ketiga didunia tidak mengherankan jika kawasan ini diperebutkan oleh banyak negara yang berada dekat dan berbatasan dengan kawasan perairan ini.

Kawasan ini dilalui oleh armada angkatan laut negara-negara maju, diantaranya armada angkatan laut Amerika Serikat , Korea Selatan, Jepang dan Australia. Lebih dari 40.000 ribu kapal melewati jalur Laut Cina Selatan setiap tahunnya setelah melewati jalur Selat Malaka. Selain itu, Laut China Selatan juga memiliki potensi alam yang begitu besar. Dengan kekayaan yang terkandung di sekitar dan juga jauh di dalam kawasan tersebut (Laut China Selatan menyimpan perikanan yang menggiurkan cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat AS setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi) laut ini salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan di abad ke-21.

Konflik perbatasan yang terjadi di kawasan Laut China Selatan kembali memanas di beberapa tahun terakhir. Yang menjadi pokok permasalahan dari sengketa ini adalah garis demarkasi. Garis tersebut tidak kontinyu dan tidak ada peta yang bisa menunjukkan seperti apa bentuknya apabila dibuat menyambung, karena tidak pernah ada penjelasan dari pihak China , maka tidak ada yang tahu arti dan tujuan sebenarnya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi. Garis tersebut tidak stabil karena dengan mudah bisa berubah dari sebelas menjadi Sembilan garis tanpa alasan jelas dan tidak terdefinisi dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis spesifik dan tidak menjelaskan bentuknya apabila

semua garis tersebut dihubungkan. Beberapa ahli mengatakan bahwa *nine dash line* ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik.

Yang kemudian menjadi permasalahan bagi Indonesia adalah kenyataan bahwa garis putus putus tersebut bertumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia yang sejak awal menolak untuk terlibat dalam sengketa ini pun akhirnya harus mengambil tindakan. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk melindungi kepentingannya di sekitar kawasan tersebut.

Selain sebagai bentuk upaya melindungi kepentingan nasionalnya, tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga merupakan respon dari isu perbatasan yang terjadi di kawasan Laut China Selatan. Kebijakan yang diambil Indonesia juga sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah Indonesia pada pemerintahan presiden Joko Widodo yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia.